

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan unilateral Jepang dalam membuang limbah nuklir dari PLTN Fukushima ke Samudera Pasifik pada tahun 2023 menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas lingkungan dan hubungan internasional. Praktik pembuangan limbah yang dilakukan secara sepihak ini tidak hanya memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga, terutama Tiongkok, tetapi juga menunjukkan bagaimana Jepang memprioritaskan solusi teknis domestik tanpa memperhitungkan risiko transnasional dan keberlanjutan lingkungan laut. Pembuangan limbah yang mengandung zat radioaktif, meskipun telah melalui proses penyaringan ALPS, tetap menimbulkan kekhawatiran global, khususnya dalam konteks keamanan ekosistem laut dan kesehatan publik. Tindakan tersebut menjadi cerminan dari logika negara modern yang lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang tanggung jawab ekologis bersama.

Dari sudut pandang hukum lingkungan internasional, kebijakan ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara tindakan Jepang dengan prinsip-prinsip penting yang tertuang dalam UNCLOS 1982 dan Deklarasi Rio 1992. Jepang dinilai melanggar prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, serta kewajiban untuk tidak menimbulkan dampak lintas batas tanpa pemberitahuan yang layak. Ketidakhadiran mekanisme konsultasi yang inklusif semakin menguatkan asumsi bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan pendekatan unilateral yang tidak memperhatikan norma-norma internasional. Dengan demikian, kebijakan Jepang dalam pengelolaan limbah nuklir dari Fukushima mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan global, sekaligus memperlihatkan perlunya tata kelola lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan ekologis bersama.

Pembuangan limbah nuklir dari PLTN Fukushima pada tahun 2023 telah menimbulkan gejolak besar terhadap kinerja ekspor perikanan Jepang, khususnya karena Jepang merupakan salah satu eksportir utama produk hasil laut di kawasan Asia Timur dan dunia. Jepang sangat bergantung pada ekspor produk perikanan seperti tuna, scallop, dan berbagai hasil laut olahan, dengan pasar utama mencakup Tiongkok, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Sebelum terjadinya pembuangan limbah, sektor ini menunjukkan tren yang stabil bahkan mengalami peningkatan volume ekspor, terutama

pasca-pandemi. Namun, insiden pembuangan limbah menyebabkan penurunan drastis dalam kepercayaan pasar terhadap keamanan produk Jepang, khususnya yang berasal dari daerah sekitar Fukushima.

Dampak paling signifikan dari kebijakan pembuangan limbah tersebut adalah diberlakukannya larangan total impor produk perikanan dari Jepang oleh Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar dalam sektor ini. Kebijakan Tiongkok tersebut merupakan respons atas kekhawatiran akan potensi kontaminasi radioaktif dalam produk hasil laut Jepang, meskipun pemerintah Jepang mengklaim bahwa limbah telah memenuhi standar keamanan internasional. Implikasi dari larangan ini sangat serius, tidak hanya bagi sektor ekspor perikanan Jepang, tetapi juga terhadap keberlanjutan mata pencaharian nelayan, perusahaan pengolahan makanan laut, dan jalur distribusi global. Larangan tersebut menyebabkan kelebihan pasokan di pasar domestik, penurunan harga produk laut, serta mendorong Jepang untuk mencari pasar alternatif seperti Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, kebijakan pembuangan limbah nuklir Jepang terbukti membawa konsekuensi ekonomi yang merugikan bagi sektor perikanan nasional dan mengganggu stabilitas ekspor. Ketergantungan Jepang pada pasar ekspor, terutama Tiongkok, menjadikan tindakan unilateral tersebut sebagai titik kritis dalam hubungan ekonomi bilateral dan persepsi global terhadap keamanan pangan Jepang. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang tidak mempertimbangkan dampak diplomatik dan pasar dapat berakibat pada gangguan sistemik dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus dirumuskan secara lebih hati-hati dan kolaboratif, agar tidak menimbulkan efek domino terhadap sektor-sektor strategis nasional dan kerja sama antarnegara.

Sikap Tiongkok terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir oleh Jepang tercermin melalui respons keras berupa protes diplomatik dan penolakan publik. Tiongkok mengecam tindakan Jepang sebagai kebijakan unilateral yang mengabaikan tanggung jawab global terhadap lingkungan laut, khususnya dalam hal konsultasi lintas batas dan prinsip kehati-hatian. Protes ini tidak hanya mewakili kekhawatiran terhadap pencemaran laut, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor regional yang berupaya menjaga stabilitas ekologis di kawasan. Tindakan Jepang dianggap merugikan

tidak hanya bagi negara tetangga, tetapi juga terhadap ekosistem laut secara keseluruhan yang menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat lintas negara.

Sebagai bentuk konkret dari penolakannya, Tiongkok menjatuhkan larangan impor total terhadap seluruh produk perikanan Jepang sejak Agustus 2023. Langkah ini langsung memukul industri ekspor perikanan Jepang, karena Tiongkok sebelumnya menyerap sekitar 22% dari total ekspor hasil laut Jepang. Larangan ini menyebabkan terganggunya distribusi produk seperti scallop, tuna, dan hasil laut olahan lainnya, menciptakan kelebihan pasokan di pasar domestik Jepang, serta menekan harga jual di tingkat produsen. Disrupsi ini menandai bahwa kebijakan lingkungan yang tidak disepakati secara multilateral dapat memicu ketegangan ekonomi, sekaligus membuktikan bahwa isu lingkungan telah menjadi instrumen strategis dalam dinamika hubungan dagang internasional.

Sebagai respons atas embargo dari Tiongkok, Jepang segera mengalihkan strategi ekspornya dengan mendorong penjualan langsung ke Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong, Thailand, dan Filipina. Strategi ini dijalankan secara aktif tanpa melibatkan pasar Tiongkok, sebagai upaya meminimalkan kerugian sekaligus menjaga arus ekspor tetap berjalan. Jepang bahkan meningkatkan volume ekspor scallop langsung ke Amerika Serikat dan mengandalkan jalur alternatif untuk mendistribusikan produk yang sebelumnya banyak dijual ke pasar Tiongkok. Diversifikasi ini juga mencerminkan kemampuan Jepang dalam mengandalkan mitra dagang lain di tengah krisis diplomatik dan memperkuat relasi ekonomi dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk perikananannya. Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang memilih untuk tidak bergantung pada satu pasar utama, serta mulai membangun ketahanan ekonomi melalui ekspansi ke wilayah yang dinilai lebih stabil secara politik dan pasar.

Keseluruhan respons Tiongkok dan penyesuaian strategi ekspor Jepang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan, ketika tidak disusun dengan pendekatan kolaboratif, dapat mengganggu struktur perdagangan internasional dan memicu reorientasi pasar global. Protes Tiongkok berhasil menjadi tekanan nyata terhadap Jepang secara ekonomi dan reputasional, sementara Jepang berusaha mempertahankan stabilitas industri perikananannya dengan membangun jaringan perdagangan baru tanpa keikutsertaan Tiongkok. Situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa transparansi,

konsultasi regional, dan kerja sama multilateral mutlak dibutuhkan dalam kebijakan lingkungan yang berdampak lintas batas. Selain itu, kejadian ini juga memperkuat pentingnya diplomasi lingkungan sebagai bagian dari strategi hubungan internasional yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem global.

5.2 Refleksi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan umum dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Perdagangan Internasional, Teori Ekonomi Politik Internasional, dan *Green Theory*. Dalam konteks *Green Theory* (Eckersley, 1992), kebijakan Jepang dalam membuang limbah nuklir ke laut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip teori tersebut. *Green Theory* menekankan pentingnya keadilan ekologis dan tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan hidup tidak hanya demi kepentingan manusia, tetapi juga demi keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Meskipun Jepang telah menyatakan bahwa limbah yang dibuang telah melalui proses penyaringan dengan teknologi ALPS, risiko jangka panjang terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia tetap belum dapat sepenuhnya dipastikan. Oleh karena itu, tindakan Jepang dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian yang menjadi inti dari *Green Theory*.

Tindakan Jepang dalam kaitannya dengan UNCLOS 1982 dan Deklarasi Rio de Janeiro 1992 dapat dilihat lebih lanjut melalui pandangan *Green Theory* Eckersley. Kedua instrumen hukum tersebut menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dan tanggung jawab lintas batas dalam pengambilan kebijakan yang berdampak ekologis. *Green Theory* memandang bahwa hukum internasional seharusnya tidak hanya dijalankan secara formalitas, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin keadilan ekologis dan mendorong negara bertindak secara etis terhadap lingkungan hidup global. Dalam hal ini, keputusan Jepang yang minim konsultasi regional dan berorientasi pada kepentingan domestik menunjukkan pengabaian terhadap semangat kolaboratif yang diusung dalam UNCLOS dan Deklarasi Rio. Dengan tidak memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ekologis lintas generasi, kebijakan Jepang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral negara terhadap lingkungan global sebagaimana ditekankan oleh Eckersley dalam *Green Theory*.

Jepang memiliki ekspor produk perikanan yang lebih unggul daripada negara lainnya, hal ini dapat dianalisis menggunakan teori perdagangan internasional dari Paul Krugman (1979) yang menyatakan bahwa perdagangan internasional di Jepang tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, namun juga dipengaruhi oleh kemampuan Jepang dalam mengelola sumber dayanya sehingga memiliki kualitas dan rasa yang lebih unggul daripada produk perikanan dari negara-negara lain. Pasca diberlakukannya pembuangan limbah, volume ekspor produk perikanan Jepang mengalami perubahan yang sangat signifikan karena terhentinya permintaan ekspor perikanan dari negara tujuan ekspor Jepang yaitu Tiongkok. Pemberhentian ekspor ke Tiongkok ini diakibatkan oleh pembuangan limbah nuklir yang membuat Tiongkok tidak mempercayai produk-produk perikanan dari Tiongkok. Perubahan volume ekspor yang dialami oleh Jepang ini dapat dianalisis menggunakan teori perdagangan internasional dari Paul Krugman (1979). Berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Krugman, kondisi penurunan volume ekspor produk perikanan Jepang terjadi akibat perubahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai kualitas dari produk perikanan Jepang, meskipun telah memberikan pernyataan bahwa limbah yang dibuang ke laut telah aman dari bahan yang berbahaya, namun kandungan tritium yang tertinggal pada limbah yang dibuang oleh Jepang memberikan persepsi yang buruk terhadap konsumen.

Kebijakan Jepang juga dinilai tidak sesuai dengan kewajiban hukum internasional, khususnya yang tercantum dalam UNCLOS 1982 dan Deklarasi Rio 1992. UNCLOS mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta mewajibkan konsultasi lintas batas apabila terdapat kebijakan yang berdampak transnasional. Demikian pula, Deklarasi Rio menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada lingkungan global. Sikap Jepang yang tetap melanjutkan pembuangan limbah tanpa melibatkan konsultasi menyeluruh dengan negara-negara tetangga, terutama Tiongkok, menunjukkan kecenderungan bertindak secara unilateral dan lebih berfokus pada kepentingan domestik daripada perlindungan lingkungan global. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa tindakan Jepang bertentangan dengan semangat kerja sama internasional dan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagaimana diatur dalam hukum dan teori yang relevan.

Kebijakan pembuangan limbah nuklir ke laut yang dilakukan oleh Jepang telah memicu gelombang protes dari berbagai negara, salah satunya adalah Tiongkok. Sebagai respons atas kebijakan tersebut, Tiongkok mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pelarangan impor produk perikanan dari Jepang, yang secara langsung berdampak signifikan terhadap volume ekspor Jepang di sektor tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kekhawatiran atas aspek kesehatan dan keselamatan publik, tetapi juga menunjukkan dinamika politik dan ekonomi yang lebih luas dalam hubungan bilateral kedua negara. Untuk memahami respons Tiongkok secara lebih mendalam, penulis menggunakan teori Ekonomi Politik Internasional yang dikemukakan oleh Robert Gilpin (1987). Gilpin berpendapat bahwa kebijakan ekonomi suatu negara tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan nasional serta struktur politik dan keamanan global. Dalam konteks ini, tindakan Tiongkok dapat dilihat sebagai wujud dari upaya melindungi kedaulatan nasional dan menjaga stabilitas domestik dari ancaman yang bersifat transnasional, termasuk potensi bahaya radiasi yang sulit terdeteksi dari produk perikanan Jepang.

Larangan impor produk perikanan Jepang oleh Tiongkok tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis atau lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik-ekonomi untuk mempertahankan legitimasi pemerintah di mata publik domestik. Tindakan ini menunjukkan bahwa negara, dalam sistem internasional, tidak hanya bertindak sebagai pelaku ekonomi rasional, tetapi juga sebagai aktor politik yang mempertimbangkan kekuasaan, legitimasi, dan keamanan nasional dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, melalui perspektif Gilpin, dapat dipahami bahwa kebijakan Tiongkok merupakan refleksi dari sinergi antara kepentingan nasional dan dinamika politik internasional, di mana isu lingkungan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam konteks persaingan dan ketegangan geopolitik di kawasan Asia Timur.

Apabila dianalisis melalui Teori Daya Saing Michael Porter, tindakan Tiongkok ini dapat dipahami sebagai upaya untuk melemahkan posisi kompetitif Jepang dalam industri perikanan global. Porter menekankan bahwa daya saing suatu negara dibangun melalui empat determinan utama: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan antar perusahaan. Dalam konteks ini, larangan impor Tiongkok tidak hanya memutus saluran permintaan utama Jepang, tetapi juga menggeser keseimbangan daya saing dengan menciptakan tekanan

pada faktor produksi domestik Jepang, khususnya para nelayan dan pelaku industri pengolahan. Selain itu, tindakan Tiongkok memperkuat posisi industri perikanan domestiknya sendiri dengan mengurangi ketergantungan pada impor Jepang dan membuka peluang bagi industri lokal untuk mengisi kekosongan pasar. Strategi ini sejalan dengan pandangan Porter bahwa daya saing ditentukan oleh interaksi kompleks antara pasar domestik dan global, di mana pemerintah dapat berperan sebagai katalis maupun penghambat. Dengan demikian, larangan impor bukan sekadar kebijakan protektif, tetapi juga instrumen strategis untuk menata ulang struktur persaingan regional dan mengurangi keunggulan Jepang dalam rantai perdagangan internasional.

Pasca diberlakukannya pelarangan impor produk perikanan oleh Tiongkok, Jepang menghadapi tantangan besar dalam sektor perdagangan luar negerinya, khususnya pada komoditas perikanan. Sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor perikanan Jepang, keputusan Tiongkok tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan komoditas di dalam negeri, yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi para nelayan serta pelaku usaha perikanan Jepang. Ketidakmampuan untuk segera mendistribusikan hasil tangkapan ke pasar luar negeri menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama bagi daerah-daerah penghasil perikanan seperti Hokkaido dan Fukushima. Dalam menghadapi krisis tersebut, Jepang melakukan reposisi strategi ekspornya dengan mengalihkan tujuan pasar ke negara-negara lain yang masih membuka akses terhadap produk perikanan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Hong Kong, Taiwan, dan Thailand. Upaya diversifikasi pasar ini merupakan langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor perikanan dan meminimalkan kerugian akibat hilangnya pasar utama.

Tindakan ini dapat dianalisis melalui teori Ekonomi Politik Internasional yang dikemukakan oleh Robert Gilpin (1987), yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi negara tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan nasional dan struktur politik global. Dalam kerangka tersebut, Jepang menunjukkan fleksibilitas politik dan ekonomi dalam mengatasi tekanan geopolitik dan menjaga kepentingan nasionalnya. Perubahan arah pasar ekspor bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga merupakan strategi geopolitik untuk memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang secara politik lebih bersahabat dan terbuka terhadap produk Jepang. Respons Jepang terhadap disrupsi perdagangan ini mencerminkan bagaimana negara berperan aktif sebagai aktor rasional dalam sistem internasional, yang mampu

menyesuaikan kebijakan ekonominya sesuai dengan dinamika global demi mempertahankan stabilitas nasional dan posisi strategis di pasar internasional.

5.3 Kontribusi Kebaruan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi utama dari studi ini terletak pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hubungan internasional, ekonomi politik, dan isu lingkungan global. Penelitian ini tidak hanya memperkuat dan mengonfirmasi validitas tiga teori utama, yakni *Green Theory* yang dikemukakan oleh Robyn Eckersley (1992), Teori Perdagangan Internasional oleh Paul Krugman (1979), Teori Daya Saing dari Michael E. Porter (1990) serta Teori Ekonomi Politik Internasional oleh Robert Gilpin (1987), tetapi juga memperluas cakupan aplikatif dari ketiga teori tersebut dalam konteks kontemporer.

Salah satu kebaruan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengamatan terhadap perubahan strategi ekspor Jepang pasca kebijakan pembuangan limbah nuklir, yang memicu larangan impor dari Tiongkok sebagai mitra dagang utama. Jepang merespons kondisi tersebut dengan mengalihkan tujuan ekspor produk perikanannya ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong. Perubahan ini mencerminkan terbentuknya jalur perdagangan baru yang tidak lagi bergantung pada Tiongkok sebagai pasar utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang kontroversial dapat memicu restrukturisasi ekonomi dan perdagangan internasional, sekaligus menggambarkan bagaimana negara merespons tekanan geopolitik dan persepsi pasar melalui penyesuaian strategi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat kerangka teori yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika perdagangan lintas negara akibat krisis lingkungan, serta membuka ruang kajian baru mengenai hubungan antara kebijakan domestik dan tatanan ekonomi global.